
Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Taufiqur Rahman

Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Rahma Apriani

Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Nurlaili

Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Supaijo

Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi

Taufiqur Rahman

taufiqur@radenintan.ac.id

Article Info

Article History :

Received 13 Feb - 2023

Accepted 05 May - 2023

Available Online

15 September – 2023

Abstract

Unemployment is one of the problems that affect the welfare of society and the Indonesian economy. One of the employment problems is the imbalance between labor demand and labor supply. This study aims to analyze the effect of Realization of Regional Expenditure and Minimum Wage on the unemployment rate in Lampung Province from the perspective of Islamic economics partially and as a whole. This research is a quantitative study using multiple linear regression analysis techniques with Times series data and processed using the Eviews 10 program. The results of this study as a whole (test F) Regional Expenditure and Minimum Wage have a positive and significant effect on the unemployment rate in Lampung Province. Partially (T test) the Regional Expenditure variable has a negative and significant effect on the unemployment rate, the Minimum Wage variable has a positive and insignificant effect on the unemployment rate in Lampung Province. In this study, when viewed from an Islamic economic perspective, the goal of Islamic economics is to achieve a higher falah which is manifested through optimizing the benefit of the entire community through the realization of Regional Expenditures and the Lampung Province Minimum Wage in accordance with Allah's commands.

Keywords : *Regional spending, minimum wages, unemployment.*

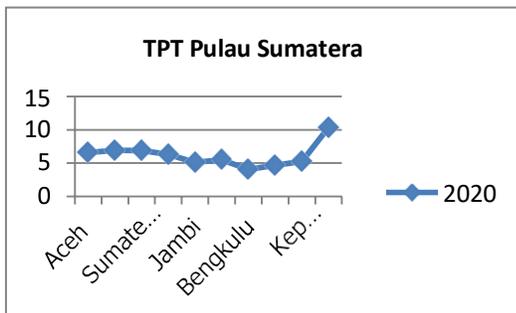
1. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang negara Indonesia tidak lepas dari masalah pengangguran.

Kompleknya masalah pengangguran di Indonesia tak lepas dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan penduduk

yang tinggi di Indonesia yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja dan sektor usaha merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang adalah tingkat pendapatan. Dengan adanya sebagian pengangguran maka akan mengurangi pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka raih. Dalam hal ini pengangguran banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya daerah Lampung dan kian meningkat pasca pandemi Covid 19 yang melanda dunia awal tahun 2020 hingga sekarang, Terjadinya pengangguran di provinsi Lampung hal ini antara lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang kian bertambah dari waktu ke waktu dengan kesempatan kerja yang tidak seimbang. (Indayani & Hartono, 2020) Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi urutan ke 9 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada kurun waktu 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020, Kepulauan Riau masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan persentase 10,34% walaupun demikian provinsi Lampung harus tetap waspada dengan kenaikan tingkat pengangguran ini. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka di pulau Sumatera pada tahun 2020:

Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2020

Jika di lihat dari keadaan provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan komparatif secara geostrategis, demografis dan sumber daya alam lainnya, Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup besar yaitu merupakan pintu atau gerbang utama kegiatan ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa dan terletak di barat daya Sumatera dengan letak geografis yang menguntungkan. sebagai salah satu simpul

distribusi barang dan jasa. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang besar untuk daerah Provinsi Lampung menggali potensi sumber keuangan. Dengan adanya kemandirian fiskal ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menekan jumlah angka pengangguran di Provinsi Lampung. Dan apabila anggaran daerah direalisasikan secara tepat tentu dapat mengatasi masalah pengangguran di daerah tersebut. Namun hal ini belum sesuai dengan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

Berikut adalah tabel angka Tingkat Pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2011- 2021. (BPS, 2021).
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021

No	Tahun	TPT (%)
1	2011	6,38
2	2012	5,20
3	2013	5,69
4	2014	4,79
5	2015	5,14
6	2016	4,62
7	2017	4,33
8	2018	4,06
9	2019	4,03
10	2020	4,67
11	2021	4,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2011-2021

banyak pekerja, banyak pengangguran, dan sumber daya alam yang tidak diolah dengan baik. (Farid, 2007) Secara umum, laju pertumbuhan angkatan kerja di negara berkembang lebih cepat dari pada laju pertumbuhan lapangan kerja. Untuk itu, Menurut data tersebut tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung berfluktuasi pada tahun 2017 hingga Tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 TPT kembali meningkat sebesar 4,67% dan meningkat sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya, salah satunya peningkatan TPT adalah adanya angkatan kerja baru dari orang-orang yang baru saja lulus SMA atau Perguruan Tinggi. Pada tahun 2020 - 2021

perusahaan umumnya tidak terserap akibat dampak pandemi covid-19. Selain itu, BPS Provinsi Lampung mencatat 39.862 orang yang kemudian menjadi pengangguran. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 6,8% di wilayah Lampung, TPT terendah sebesar 2,53% untuk penduduk berpendidikan SD ke bawah, dan TPT tertinggi sebesar 8,53% pada tingkat pendidikan SMA.(BPS Sumatra, 2020) Angka dengan tingkat pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dan akan mencerminkan peningkatan kualitas hidup penduduk dan peningkatan distribusi pendapatan., Menurut Teori Lewis didukung oleh Ranis dan Fei yang menyatakan di negara berkembang terlalu negara berkembang harus meningkatkan upaya untuk mengurangi pengangguran Saat ini banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh tenaga mesin, akibat peningkatan lowongan yang lebih rendah dari peningkatan angkatan kerja, banyak pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.(Mahsunah, 2013) Menurut Keynes, campur tangan pemerintah diperlukan karena persoalan ini tidak bisa diserahkan pada sistem pasar bebas. Ketika jumlah pekerja bertambah, begitu juga upah, ini menjadi merugikan, bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti penurunan daya beli masyarakat terhadap barang. Pada akhirnya produsen akan merugi dan tidak mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, peran penting pemerintah dalam urusan pembangunan sangat diperlukan, untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi semua, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup rakyat miskin Salah satu kebijakan pemerintah dengan mengalihkan Pengelolaan Belanja Daerah secara baik dan juga perencanaan sedemikian rupa dengan melihat prioritas daerah maka akan dapat mengoptimalkan APBD. Serta kebutuhan daerah yang harus diperhatikan untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengurangi tingkat pengangguran, peran

pemerintah sangat dibutuhkan. . Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah belanja daerah karena dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser titik keseimbangan pendapatan, sehingga apabila semakin besar pengeluaran pemerintah, di harapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.(Idris, 2018, p. 24).

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Lampung Tahun Anggaran 2011- 2021 (Rp)

No	Tahun	Belanja Daerah (X1)
1	2011	2.566.078.806
2	2012	4.354.050.898
3	2013	3.884.534.953
4	2014	4.454.187.317
5	2015	4.781.202.049
6	2016	5.476.921.596
7	2017	5.497.354.014
8	2018	7.538.988.966
9	2019	7.058.713.899
10	2020	6.967.358.448
11	2021	7.098.372.686

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-2021.

Belanja daerah di provinsi Lampung pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja Daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 yaitu Rp 3.884.534.953 dan terus berluktuasi di tahun 2014-2019, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 91.355.451 dari tahun sebelumnya di tahun 2019 hal ini tak lepas dari dampak pandemi covid 19 di karenakan tingkat pendapatan yang menurun maka belanja daerah ikut mengalami penurunan dan meningkat kembali Rp 7.098.372.689 pada tahun 2021. Secara umum, belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Penyebab kenaikan belanja daerah biasanya terkait dengan penyesuaian perubahan nilai tukar rupiah, inflasi, penyesuaian faktor ekonomi

makro, dan perubahan besaran cakupan pelayanan. Namun dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Dengan demikian belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Dengan alokasi anggaran yang tinggi juga diharapkan mampu

mengatasi kemiskinan dan pengangguran jika rencana pelaksanaan mencapai target yang dianggarkan. Melalui belanja daerah diharapkan dapat terwujud secara adil dan merata serta dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti pada masa Rasulullah SAW. Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi angka pengangguran di Provinsi Lampung, diantaranya adalah faktor upah. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja jika dilihat dari segi penawaran tenaga kerja. Biasanya tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para pekerja itu sendiri yang menentukan besaran upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Menurut peraturan

pemerintah ketenagakerjaan dan migrasi no.7 tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang belum menikah dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dan berlaku selama 1 (satu tahun) di berturut- turut. Perkembangan tingkat Upah Minimum Propinsi di Propinsi Lampung setiap tahun mengalami peningkatan, dengan kenaikan upah minimum setiap tahun maka kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan seimbang dengan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut meningkat. Berikut adalah tabel upah minimum provinsi Lampung tahun 2011-2021.

Tabel 1.3 Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2011-2021 (Rp)

No	Tahun	UMP (X2)
1	2011	855.000
2	2012	975.000
3	2013	1.150.000
4	2014	1.399.037
5	2015	1.581.000
6	2016	1.763.000
7	2017	1.908.447
8	2018	2.074.673
9	2019	2.241.270
10	2020	2.432.002
11	2021	2.432.002

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-2021

Tabel 1.3 menunjukan bahwa perkembangan upah minimum setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp.1.908.447.50 mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.432.001.57 dan pada tahun 2021 tetap mencapai Rp. 2.432.001.57. Upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja, jika tingkat upah ditetapkan lebih tinggi maka akan mempengaruhi kenaikan biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja sehingga menimbulkan tingkat pengangguran.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam Mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Nursafitri & Yudha, 2020) dengan penelitian berjudul “Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah variabel belanja daerah. Hasil penelitian dari (Kaharudin, Kumenaung, & Niode, 2019) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001- 2017)” Belanja Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Pengangguran. ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah Pengangguran yaitu sebesar 0,31. Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Pengangguran akan turun sebesar 0,31 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila belanja pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran di daerah itu. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut: Ha1: Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 41 dan 42. Dan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja Dalam penelitian yang dilakukan (Yacoub & Firdayanti, 2019) dengan penelitiannya berjudul Pengaruh Inflasi,

Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian (Effendy, 2019) dengan penelitian berjudul Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia dan didapatkan hasil upah minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran, hubungan variabel upah minimum dengan pengangguran bersifat positif, artinya apabila upah minimum meningkat maka pengangguran pun akan meningkat. Dari hasil penelitian di atas maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut: Ha2: Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung.

3. METODE PENELITIAN PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena analisis yang di gunakan menggunakan alat statistik ekonomi yang akan menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. (Usman, 2012) Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang diterbitkan secara resmi maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (Santoso, 2007).

3.1. Populasi dan Sempel

Populasi dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan berdasarkan jangka waktu tahunan yaitu data belanja daerah, upah minimum dan tingkat pengangguran pertahun yang di publikasikan oleh BPS Provinsi Lampung dengan keseluruhan data di peroleh dari 15 kabupaten wilayah Provinsi Lampung yaitu dengan rentang waktu 11 tahun terakhir dari tahun 2011-2021. (Santoso, 2007).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik

penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan penelitian ini menentukan sendiri sampel yang diambil karena memiliki pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu belanja daerah, upah minimum dan tingkat pengangguran yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung.

3.2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan datapanel dan diolah menggunakan program Eviews 10. Eviews 10.

3.3. Model Analisis Regresi

Analisis ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model kerja yakni Tingkat Pengangguran = f (Belanja Daerah dan Upah Minimum), maka persamaan regresi liniernya adalah;

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_t$$

Dimana:

β_0 : konstanta

β_1, β_2 : parameter

ε_t : Standar Error

Y: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

X1 : Belanja Daerah (BD)

X2 : Upah Minimum Provinsi (UMP)

Model regresi linear berganda ini akan diuji melalui uji asumsi klasik dan uji hipotesis t dan uji hipotesis F.

4. HASIL PENELITIAN

Variabel Belanja Daerah (BD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi Lampung. Belanja Daerah (BD) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Lampung. Pembahasan Hasil Penelitian Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra

Yhuda (2020) dengan penelitian berjudul Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah variabel belanja daerah. Hasil penelitian dari Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, Audie O. Niode (2019) dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017) Belanja Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap akan turun sebesar 0,31 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila belanja pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran di daerah itu. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian Effendyy dan Rully Sutansyah (2019) dengan penelitian berjudul Pengaruh Upah Minimum Terhadap pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia dan didapatkan hasil upah minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran, hubungan variabel upah minimum dengan pengangguran bersifat positif, artinya apabila upah minimum meningkat maka pengangguran pun akan meningkat. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan tanda negatif, Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan tanda negatif, yakni

sebesar -0,426996. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Belanja Daerah terhadap Tingkat Pengangguran (TPT) menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan Pengangguran. Ini di tunjukkan oleh koefisien regresi jumlah Pengangguran yaitu oleh nilai t hitung variabel Belanja Daerah sebesar 0,31. Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Pengangguran sebesar - 2,341991 lebih kecil daripada nilai t sebesar 2,26216 dengan tingkat tabel kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian Belanja Daerah (BD) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Belanja Daerah (BD) sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada penurunan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar - 0,426996 persen dengan asumsi (*ceteris paribus*). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai realisasi belanja daerah provinsi Lampung, maka terjadinya penurunan pengangguran. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Berdasarkan hasil regresi, koefisien regresi untuk variabel Upah Minimum (UMP) menunjukkan tanda positif, yakni sebesar 0,041680. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh variabel Upah Minimum (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Lampung menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linier berganda dimana dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan atau Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linier berganda dimana dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan antara Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran. Pengangguran yang terjadi disuatu wilayah menggambarkan pengaruh yang buruk dimana banyaknya pengangguran akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Karena masyarakat yang pada usia produktifnya tidak mampu memenuhi t

hitung variabel Upah Minimum sebesar kebutuhan hidupnya kemudian akan 0,255968 lebih kecil daripada nilai t tabel berdampak pada penurunan produktifitasnya, Sehingga sumber daya sebesar 2,26216 dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, Upah Minimum (UMP) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1 persen, maka akan berakibat pada kenaikan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,255968 persen dengan asumsi (*ceteris paribus*). Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hipotesis variabel Upah Minimum H_0 diterima, dengan artian bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. Hal ini terbukti setiap kenaikan Upah Minimum meningkat maka Tingkat Pengangguran juga ikut meningkat. yang harusnya terkelola dengan baik menjadi tidak maksimal. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan pengangguran tanpa pengoptimalan kemampuan kesempatan kerja dapat menjadi indikator atau variabel yang berpengaruh negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Bekerja merupakan perintah Allah SWT dan menjadi sunah Rosulallah SAW, dalam islam pengangguran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membantu sesama manusia. Bekerja dalam sistem ekonomi islam merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim sebagai kewajiban syara" dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya, sesuai dengan firman allah dalam QS. At-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَارِدُونَ إِلَى
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنشِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S At Taubah [9]:105) Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya bekerja karena

dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kehidupannya dan juga keluarganya di dunia. Bahkan diberikan pahala yang setimpal sesuai dengan amal/pekerjaan yang telah ia kerjakan. Islam menganjurkan untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah SWT akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga tidak mengajarkan umatnya untuk malas bekerja bahkan seseorang yang miskin sangat dekat dengan kekufuran. Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi seorang pemikir terkemuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Quran. Dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neo-klasik). Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan

akuntabilitas kinerja pemerintah. Q.S Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan tentang keadilan dan terealisasinya seluruh harta kekayaan agar harta tersebut tidak berfokus pada golongan tertentu saja, yang berbunyi: Artinya: "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."(Q.S Al Hasyr [59] 7). Ayat tersebut menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan. Pengangguran juga bisa terjadi karena adanya upah, sistem ekonomi islam tidak sekedar memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas perekonomian, tapi lebih dari itu kerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Berikut ayat Al Quran yang menjelaskan betapa pentingnya pemberian upah Q.S Az Zumar ayat 35: Artinya: Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.S Az Zumar [39]:35)

Maksudnya Allah menghalalkan upah, sebab upah (tsaman) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu

perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah. Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. (Yusuf, 2010).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian tentang Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sebagai berikut: 1. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variable Belanja Daerah memperoleh nilai coefficient sebesar -0.42696, dan nilai probability sebesar 0.0473 atau ($<0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. 2. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variable Upah Minimum memperoleh nilai coefficient sebesar 0.041680, dan nilai probability sebesar 0.8044 atau ($>0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021. 3. Dalam penelitian ini bila ditinjau menurut perspektif ekonomi islam belanja daerah sepenuhnya terealisasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini dapat dilihat realisasi belanja daerah Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021 masih bersifat fluktuatif pada segi pengeluaran. Namun di lihat dengan peningkatan pengangguran, belanja daerah dapat berperan aktif dalam menurunkan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung maka belanja daerah/ pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian termasuk masalah pengangguran. Jika dilihat dari ekonomi islam dalam pemberian upah yang layak maka dapat dilihat di provinsi Lampung tahun

2011-2021 peningkatan upah minimum dapat menyebabkan masalah pengangguran meningkat hal tersebut karena faktor dari penetapan upah minimum provinsi Lampung belum sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi islam yakni upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam islam juga menjelaskan bawasannya tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumberdaya yang ada secara baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). Provinsi Lampung Dalam Angka 2021. *BPS Provinsi Lampung*, 2(2).
- BPS Sumatra. (2020). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 19(27), 1–8.
- Effendy, R. S. (2019). Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), 115–124.
- Farid, A. (2007). ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 1980-2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007*, 1–31.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomisebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201–208.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Mahsunah, D. (2013). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Nursafitri, S., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Instrumen moneter dan belanja daerah serta pengaruhnya terhadap

- pengangguran terbuka. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 121–136.
- Santoso, G. (2007). Fundamental metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Usman, R. (2012). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. *Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Yacoub, Y. M. F., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 132–142.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 10(2), 309–324.